

## ANALISIS PENETAPAN STANDAR BIAYA PENDIDIKAN PADA SMA NEGERI 2 KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA

RM. Teguh Eko Atmaja<sup>1</sup>, Cut Zahri Harun<sup>2</sup>, Sakdiah Ibrahim<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3)</sup> Prodi Magister Administrasi Pendidikan Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia  
Email Penulis: [teguhekoatmaja@yahoo.com](mailto:teguhekoatmaja@yahoo.com)

**Abstract:** *Determination of standard cost of education is a criterion for good measure the overall expenditure in the form of cash and non-cash as an expression of the sense of responsibility of all parties (the public, parents, and government) to the development of education in order to achieve educational goals efficiently and effectively. The purpose of this study was to determine the ability of the principal to establish the cost of education, including: (1) Preparation of the cost of education; (2) The use of the cost of education; and (3) Auditing the cost of education. This study used a qualitative approach with descriptive methods, techniques of data collection is done through interviews, observation, and documentation. Subjects were principal, treasurer and inspectorate Nagan Raya. The research found: (1) Preparation of educational costs through Plan Budget (RKA) and Draft Budget Shopping Opinions School (budgets) are discussed in a budget meeting in the DPRK; (2) The use of the cost of the education budget comes from the state budget, and the budget and other sources of educational expenses of parents, private, business, and alumni of the largest education budget priorities is to pay the salaries of teachers / employees, which is between 75-80% of the total budget, and the rest for non-teachers' salaries; and (3) the cost of education is an activity Auditing look carefully, investigate, study, examine and investigate the cost of education, including procedures for investigating its books, one truth in a case, the events that have been recorded, placed on their posting, as well as the receipt of cash flows and goods owned by a school organized by the government and society. It is expected that the inspectorate in order to direct and supervise the principal standard-setting the cost of education on the preparation, use, and effective auditing and efficiency so that the cost of education in school on target.*

**Keywords:** *Determination of Standard Cost of Education and Supervision*

**Abstrak:** Penetapan standar biaya pendidikan adalah suatu kriteria untuk mengukur keseluruhan pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efisien dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan kepala sekolah dalam menetapkan biaya pendidikan, meliputi: (1) Penyusunan biaya pendidikan; (2) Penggunaan biaya pendidikan; dan (3) Pengauditan biaya pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, bendahara dan inspektorat Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ditemukan: (1) Penyusunan biaya pendidikan melalui Rencana Penggunaan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Sekolah (RAPBS) yang dibahas dalam rapat anggaran di DPRK; (2) Penggunaan biaya pendidikan bersumber anggaran pemerintah berasal dari APBN, dan APBD dan sumber biaya pendidikan lainnya dari orang tua, swasta, dunia usaha, dan alumni dengan prioritas anggaran pendidikan terbesar adalah untuk membayar gaji guru/ pegawai, yaitu antara 75-80% dari total anggaran, dan selebihnya untuk non-gaji guru; dan (3) Pengauditan biaya pendidikan merupakan kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengusut biaya pendidikan, termasuk mengusut tata cara pembukuannya, salah benarnya suatu hal, peristiwa yang telah dicatat, ditempatkan pada pos-posnya, serta proses arus penerimaan uang dan barang yang dimiliki oleh suatu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan kepada inspektorat agar dapat mengarahkan dan mengawasi kepala sekolah penetapan standar biaya pendidikan tentang penyusunan, penggunaan, dan pengauditan secara efektif dan efisiensi sehingga biaya pendidikan di sekolah tepat sarannya.

**Kata Kunci:** Penetapan Standar Biaya Pendidikan, dan Pengawasan

## PENDAHULUAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/ perseorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut.

Dalam UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31 bahwa “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Biaya pendidikan, termasuk dari mana sumber-sumbernya diperoleh, sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan antara lain faktor harga dan faktor lamanya waktu pelaksanaan.

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber pada kegiatan atau

program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Menurut Levin (Fattah, 2012:6) yaitu “pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda”.

Perhitungan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, gaji guru dan pegawai lainnya. Terdapat beragam dalam komponen dalam biaya pendidikan, umumnya menghitung dari biaya nyata (*real cost*) atau disebut *money cost*, sedangkan biaya peluang (*opportunity cost*) sebagai biaya yang harus dibayar.

Pembiayaan dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Cohn, et.al (Fattah, 2012:23) menyatakan: Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya satuan digunakan dalam rangka menghitung biaya per kegiatan atau per mata anggaran. Biaya satuan penting dalam sistem perencanaan anggaran, baik untuk perencanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pembiayaan, Pasal 1 ayat (10) menetapkan “standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Permasalahan yang krusial dalam dunia pendidikan, antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya masyarakat secara profesional sesuai dengan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan, sehingga meningkatnya putus sekolah.

Rendahnya kualitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kualitas kepala sekolah dalam memimpin dan menciptakan kultur sekolah yang kondusif, kualitas tenaga administratif dalam menjalankan tugas dan kualitas dukungan lingkungan masyarakat terhadap pendidikan. Rendahnya anggaran pendidikan yang sebagian besar mengandalkan dari pemerintah mengakibatkan besarnya biaya satuan pendidikan per siswa (*unit cost*) menjadi sangat rendah.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Pengertian Biaya Pendidikan**

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Tilaar (Maisah, 2013:99) yaitu “biaya merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat”.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Cohn (Sagala, 2011:209) mengatakan “biaya pendidikan adalah *cost* yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dalam pendidikan”.

Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk pendidikan, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari danan yang diturunkan dari pemerintah pusat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### **Konsep Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan

yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa. Biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan.

Menurut Anwar (2013:146) adalah: Biaya langsung untuk pengajaran memenuhi persyaratan seperti inheren pada hasil, dapat dihitung, dan tidak dapat dihindarkan. Karena itu, biaya langsung yang demikian, dapat dikatakan biaya langsung standar sedangkan biaya langsung yang tidak memenuhi persyaratan di atas dapat dikatakan biaya langsung penunjang untuk pengajaran.

Biaya tidak langsung (*indirect cost*), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Supriadi (2010:4) menyatakan “biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, transportasi ke sekolah, jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

Biaya pribadi (*private cost*) adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya “*forgone opportunities*”. Dalam kaitan ini Yanes (Anwar 2013:147) mengatakan “*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”.

Biaya masyarakat (*social cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan belajar.

Selanjutnya, *monetary cost* adalah pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk seperti itu, melainkan dalam bentuk jasa, tenaga dan waktu, biaya semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/ dengan nilai uang. Sedangkan, *non monetary cost* adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

### **Penganggaran Biaya Pendidikan**

Penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang amat penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jamaluddin (Suharsaputra, 2010:265) menyatakan “anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari uang untuk jangka waktu tertentu”.

Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Fungsi anggaran di samping sebagai alat untuk

perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.

### **Penetapan Standar Biaya Pendidikan**

Standar nasional pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya standar, guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru akan terfokus pada hasil (*output*) yang harus dicapai, tidak memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*). Matin (2014:218) menyatakan “standar adalah suatu kriteria yang ditetapkan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan”.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya satuan yang ideal adalah biaya satuan yang dapat memenuhi kebutuhan dan berlaku untuk semua wilayah. Matin (2014:53) mengemukakan “biaya satuan dibedakan menjadi dua yaitu biaya satuan untuk anggaran rutin dan biaya satuan untuk anggaran

pembangunan”. Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dapat di gali melalui berbagai sumber, seperti masyarakat industri, masyarakat penerima jasa pendidikan, organisasi sosial masyarakat, ataupun lembaga swadaya masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan karakter lembaga pendidikan yang bersangkutan.

### **Analisis Biaya Pendidikan**

Analisis biaya merupakan instrumen yang memberikan gambaran pemanfaatan secara ekonomis dari suatu perencanaan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Terdapat berbagai tipe analisis biaya yang relevan untuk diterapkan dalam bidang pendidikan, menurut Fattah (2012:8), antara lain “*cost-benefit analysis, study the determinants of educational costs, study economies of scale* dalam aplikasi teknologi pendidikan baru, dan studi analisa biaya pembangunan sekolah”.

### **Pertanggungjawaban Biaya Pendidikan**

Pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk instansi yang terkait (KPKN).

Cormark (Mulyasa, 2011:204) menyatakan “pertanggungjawaban (*auditing*)

merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas”. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut di atas harus disertai dengan bukti-bukti pengeluaran asli dengan tembusan disampaikan ke setjen kemdiknas cq Biro Keuangan.

### **Pengawasan Biaya Pendidikan**

Pengawasan dapat artikan pembinaan, dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Harahap (Aedi, 2014:2) menyatakan bahwa “pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut”. Pengawasan penggunaan biaya pendidikan merupakan aktivitas melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan biaya pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan agar biaya yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif, bisa mendeskripsikan sesuatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan perkembangannya. Sukmadinata (2012:54) mengemukakan “penelitian deskriptif

adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau”.

Penelitian ini telah penulis laksanakan di SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan waktu penelitian telah penulis laksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan April, Mei dan Juni 2014. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Satori dan Komariah (2013:45) mengatakan “subjek penelitian merupakan entitas yang mempengaruhi disain riset, pengumpulan data, dan keputusan analisis data”. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, inspektorat dan bendahara sekolah pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. instrumen yang diharapkan dapat melengkapi dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui pedoman wawancara, pedoman observasi dan studi dokumentasi.

Uji kredibilitas dilakukan untuk menyakinkan bahwa data yang ditampilkan benar-benar kredibel dan valid sehingga tidak diragukan lagi tingkat kebenarannya. Sugiyono (2013:121) menyatakan bahwa: “uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*'.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Riduwan (2010:97) mengemukakan "metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data dan informasi yang telah diperoleh akan dianalisis dengan pola kualitatif dan diinterpretasikan secara terus menerus mulai awal penelitian sampai berakhir penelitian. Proses penganalisisan dilaksanakan bertujuan untuk membantu peneliti memudahkan dan menyelenggarakan tumpukan data yang diperoleh, sama ada disimpan data tersebut atau dikesampingkan apabila tidak memenuhi kehendak pertanyaan penelitian.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penyusunan anggaran merupakan langkah untuk merealisasikan rencana yang telah disusun melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) menjadi dokumen pelaksanaan anggaran melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara, guru senior, dan komite sekolah. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.

Penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah, biaya dikembangkan dalam format-format yang meliputi: sumber pendapatan, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran honorium dan kesejahteraan. Sumber dan alokasi dana merupakan indikator terpenting dalam menunjang terlaksananya program sekolah. Sumber dan alokasi dana menurut bendahara berasal dari pemerintah melalui APBN, APBD dan penerimaan dari sumber lain yaitu dari orang tua siswa dalam bentuk sumbangan dan hibah.

Prioritas anggaran terbesar adalah untuk membayar gaji guru/ pegawai, yaitu antara 75-80% dari total anggaran, dan selebihnya untuk non-gaji, terutama untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar. Sisi penerimaan biaya ditentukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang dibiayai.

Penggunaan dan pelaksanaannya harus realistis dan memperhatikan aspek kemampuan dalam mengelolanya, karena penetapan alokasi pembiayaan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan pembelajaran. misalnya: perbaikan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan; peningkatan efisiensi belanja barang dan jasa; peningkatan bantuan sosial yang langsung menyentuh kepentingan rakyat miskin.

Pemeriksaan atau audit biaya pendidikan adalah merupakan kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengurut biaya pendidikan, termasuk mengurut tata cara pembukuannya, salah benarnya suatu hal, peristiwa yang telah dicatat, ditempatkan pada pos-posnya, serta proses arus penerimaan uang dan barang yang dimiliki oleh suatu sekolah atau suatu unit kerja lainnya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian kegiatan penelitian penggunaan dana anggaran. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan apakah dana yang disediakan itu digunakan secara efisien atau boros atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pembahasan**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam dokumen pelaksanaan anggaran melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara, guru senior, dan komite sekolah. Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran.

Dalam penyusunan anggaran, sistematika yang akan tertuang dalam anggaran tersebut akan menggambarkan model penyusunan anggaran. Suharsaputra (2010:267) mengemukakan: “sistem anggaran program merupakan anggaran yang disusun per program dengan subset program yang terkait dengan

program tersebut seperti anggaran untuk penata guru yang di dalam mencakup gaji/upah panitia, gaji/upah penatar, konsumsi selama penataran, dan sebagainya”.

Penggunaan anggaran (biaya) berasal dari APBN, APBD dan ada juga yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Prioritas anggaran terbesar adalah untuk membayar gaji guru/ pegawai, yaitu antara 75-80% dari total anggaran, dan selebihnya untuk non-gaji, terutama untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar. Evaluasi penggunaan biaya pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu.

Matin (2014:205) menyatakan bahwa: Penggunaan anggaran (biaya) pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program pendidikan, menetapkan kriteria sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan, mengantisipasi masa yang akan datang, menyempurnakan rencana dan program tahunan, serta melaksanakan perbaikan pelaksanaan kegiatan, dan menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan yang terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan adalah merupakan kegiatan yang bersifat sistemik dan sistematis.

Pemeriksaan pelaksanaan biaya pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengecek dan meneliti kebenaran, keaslian, dan keabsahan dokumen-dokumen yang ada

sebagai akibat telah terjadinya transaksi antara pihak-pihak yang terlibat, dan menelusuri setiap pencatatan terhadap semua buku yang digunakan dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut, baik penerimaan maupun pengeluaran uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran barang.

Dunn (Engkoswara dan Komariah, 2011:220) menjelaskan bahwa “pemantauan (*monitoring*) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan”. Pengelolaan biaya menyangkut penggunaan sejumlah dana yang diamanatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola harus dapat dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban program maupun dana yang digunakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penyusunan biaya pendidikan melalui Rencana Penggunaan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dibahas dalam rapat anggaran di DPRK. Dalam biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif

sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Penggunaan prioritas biaya pendidikan terbesar adalah untuk membayar gaji guru/pegawai, yaitu antara 75-80% dari total anggaran, dan selebihnya untuk non-gaji, terutama untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar. Penggunaan biaya pendidikan bersumber anggaran pemerintah berasal dari APBN, dan APBD. Sedangkan sumber biaya pendidikan lainnya dari orang tua, swasta, dunia usaha, dan alumni. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan yang terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan adalah merupakan kegiatan yang bersifat sistemik dan sistematis.

Pengauditan biaya pendidikan melalui mengecek dan meneliti kebenaran, keaslian, dan keabsahan dokumen-dokumen yang ada sebagai akibat telah terjadinya transaksi antara pihak-pihak yang terlibat, dan menelusuri setiap pencatatan terhadap semua buku yang digunakan dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut, baik penerimaan maupun pengeluaran uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran barang.

Pemeriksaan atau audit biaya pendidikan adalah merupakan kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengurut biaya pendidikan, termasuk mengurut tata cara pembukuannya, salah benarnya suatu hal, peristiwa yang telah dicatat, ditempatkan pada pos-posnya, serta proses arus penerimaan uang dan barang yang dimiliki oleh suatu

sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

### Saran

Dinas Pendidikan dalam penetapan biaya standar diharapkan tidak terlalu terpaku pada anggaran tahun sebelumnya, tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan biaya pada tahun berjalan. Pengawasan anggaran untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran, tetap dipertahankan, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga mampu menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pemeriksaan anggaran dan pengimplementasian anggaran harus sesuai dengan kebijakan peraturan dan standar-standar yang berlaku. Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.

Kepala sekolah hendaknya diberi kekuasaan (kewenangan) untuk mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun orang tua atau masyarakat untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan manajerial dalam menggali sumber dana, menganggarkan atau mengalokasikan dana secara tepat dan mengelolanya sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien.

Komite sekolah diharapkan dapat terus mengawasi dan menyediakan sarana dan

prasarana yang memadai dan dibutuhkan oleh guru sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aedi, N., 2014. *Pengawasan Pendidikan: Tinjauan, Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, M. I., 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engkoswara dan Komariah, A., 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, N., 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anonim, 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maisah, 2013. *Manajemen Pendidikan*. Ciputat: Referensi.
- Matin, 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E., 2011. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Riduwan, 2010. *Metode dan Analisis Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, S., 2011. *Manajemen Stratejik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, D. dan Komariah, A., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U., 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S., 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, D., 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.